

**Perempuan fundamentalis adalah perempuan yang *powerless*, takluk, taat, dan dibekuk secara ideologis Mereka menyerah total kepada kuasa Patriarki, ( *tetapi*) Benarkah itu.....?**

## **Syariah untuk Kekuasaan Perempuan ?! (Cerita tentang pergulatan kaum Perempuan di Pesantren)**

**Ciciek Farha**

*Salah satu komunitas yang tengah disorot masyarakat internasional berkaitan dengan persoalan radikalisme agama adalah Pondok Pesantren al Mukmin, Ngruki, Surakarta. Biasanya berbagai opini, pemberitaan, diskusi maupun obrolan tentang pesantren ini terkonsentrasi pada berbagai aspek yang dikaitkan dengan kekerasan politik dan sudah barang tentu seputar “jagad” lelaki. Adakah yang menggubris dunia perempuan Ngruki?*

Apa yang sebenarnya terjadi di pesantren Putri al Mukmin Ngruki? Ditengah gemuruh isu terorisme yang bertubi-tubi, pun sampai pesantren nyaris dibubarkan oleh pemerintah RI, tak banyak yang ambil peduli terhadap komunitas perempuan dilingkungan “dalam pesantren” itu. Eksistensi kelompok ini nyata dilewatkan begitu saja.

Itulah yang merupakan salah satu sebab yang mendorong saya untuk kembali ke pondok putri ini untuk kedua kalinya. Komunitas Ngruki memang bukan sesuatu yang baru bagi saya. 10 thn lalu( 1994) saya pernah selama kurang lebih 1 tahun berada di sana dalam rangka pembuatan tesis S2 saya<sup>1</sup>.

Waktu itu, Pesantren Ngruki sebagaimana kelompok islamis pada umumnya masih dalam tekanan politik ORBA (orde Baru) di bawah rezim Suharto. Isu negara Islam atau Syariah tidak bisa didiskusikan secara terbuka sehingga menjadi perbincangan “dibawah tanah” . Meski isu Syaria ditekan di alam politik masyarakat Indonesia secara umum, di dalam pesantren gemanya terdengar sangat nyaring. Syaria menjadi tema sentral dalam denyut kehidupan PP al Mukmin. Dalam konteks ini ada upaya keras untuk merealisasikan cara hidup perempuan yang berdasar syar’iah.

---

<sup>1</sup> Hasil penelitian tersebut telah dituangkan dalam bentuk tesis berjudul “ISLAMIC WOMEN’S ROLES (A CASE STUDY IN PESANTREN AL MUKMIN, Ngruki, SUKOHARJO, CENTRAL JAVA)



Pada dasarnya, semua upaya yang dilaksanakan di Pondok Ngruki ini hendak merealisasikan keyakinan bahwa agama bukanlah sekedar teori tetapi amalan perbuatan. Dalam kehidupan di Pesantren ini, agama didekati secara hukum (hukum *oriented*) Warga pondok Pesantren ini “dididik” agar peka hukum. Ada beragam peraturan yang harus dijalankan beserta segenap imbalan dan sanksi yang diterima jika terjadi pelanggaran. Semua itu disosialisasikan secara intensif melalui berbagai cara dan sarana. Dalam kegiatan formal (sekolah) maupun informal (kepesantrenan, ekstra kulikuler).

Di komunitas ini segregasi antara lelaki dan perempuan merupakan sesuatu yang diyakininya sebagai kewajiban yang bersifat *syar’iyah* (berdasarkan tuntutan Al-Quran dan perilaku nabi Muhammad Saw). Segregasi adalah salah satu cara pesantren untuk menghindari “*ikhtilat*” (Pergaulan campur atau close interaksi antara laki laki dan perempuan). Hal ini dilakukan karena pada prinsipnya diyakini bahwa masyarakat ideal Islam adalah masyarakat yang tersegregasi. Meskipun demikian menurut beberapa pengasuh senior, kontak antara laki-laki dan perempuan dalam batas tertentu tetap diperbolehkan dan telah di atur dalam syariah.

Selain *ikhtilat*, persoalan keperempuanan lain yang cukup panas dan mengundang debat seru di komunitas ini adalah persoalan *safar nissa* yakni aturan perjalanan kaum perempuan. Kontroversi tentang hal ini telah berlangsung sejak diperdebatkannya beberapa hadits yang teksnya melarang kaum perempuan bepergian sendirian tanpa pendamping lelaki yakni suami dan *mahram* (kerabat laki-laki yang disahkan agama diantaranya kakak/adik, paman dan kakek ).

Sejauh terkait dengan peraturan tertulis ketentuan dasar peran dan posisi kaum perempuan dituangkan dalam buku khusus yang diajarkan kepada para santri selama 2 semester. Buku setebal 48 halaman ini, diawali kutipan 2 buah hadits<sup>2</sup>. Buku berjudul **Kewanitaan ini** terdiri dari 8 bab, yaitu ***Beberapa Pandangan Masyarakat Tentang Wanita, Peranan Antara Laki-laki dan Perempuan, Ciri-ciri Wanita Sholehah, Wanita dan Aurat, Peranan Wanita dalam Kehidupan Masyarakat, Tugas dan Peranan Wanita Menurut Kedudukannya, Wanita Muslimah dan Busana serta beberapa larangan bagi kaum wanita muslimah***<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Riffat Hassan Teolog feminis asal Pakistan Mengkategorikan 2 hasis ini sebagai hadist misogini (Baca: membenci perempuan). Hadis tersebut berkisah tentang asal kejadian manusia perempuan (Hawa) yang diklaim berasal dari tulang rusuk Adam (manusia pertama). Tulang rusuk tersebut rapuh dan bengkok. Dengan demikian perempuan secara asasi selalu bengkok dan rapuh sesuai asal kejadiannya.

<sup>3</sup> Dalam waktu dekat ini ada rencana untuk melengkapi buku ini dengan materi tambahan agar lebih memadai. Hal ini dituturkan ustazah SS berikut ini :



Secara tegas buku ini memisahkan dan menjabarkan berbagai unsur yang dicirikan sebagai perempuan dan laki-laki. Bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda secara fitrati, baik dari segi biologis, psikologis maupun fungsi-fungsi sosialnya.

**Pola pembedaan Perempuan dan Lelaki berbasis Gender di ....**

	<b>Perempuan</b>	<b>Lelaki</b>
Sifat	Feminin	Maskulin
Wilayah	Domestik	Publik
Fungsi	Reproduktif	Produktif
Peran	Istri dan Ibu rumah tangga	Pencari nafkah dan Kepala rumah tangga

Itulah secuplik sketsa tentang “formalisasi syariah” ala pesantren putri Ngruki. Dalam perjalanan sejarah ternyata konstruksi Syariah yang dijalankan selama ini ternyata tidak selalu memuaskan kaum perempuan di komunitas ini. Alasannya jelas, berbagai kebijakan yang disandarkan atau diatas namakan syariah kurang mengakomodir kepentingan mereka secara optimal. Oleh sebab itulah kemudian muncul perlawanan. Awalnya hanya bersifat individual (sendiri sendiri). Namun lama kelamaan mengkrystal menjadi “gerakan kolektif”. Apa saja bentuk perlawanan itu? Berikut beberapa contoh.

@@@@@

Salah satu peraturan di Ngruki menegaskan bahwa pencari nafkah adalah lelaki/suami dan perempuan/istri adalah pekerja domestic (pengasuhan anak dan urusan rumahtangga). Namun secara factual, kaum perempuan adalah pemasok terbesar ekonomi rumahtangga. Sebagian

---

“Buku kewanitaan memang perlu dibenahi. Hal ini dilakukan karena perkembangan isu kewanitaan Mutakhir seperti persoalan emansipasi, feminisme, karir dan lain-lain belum tercakup di dalam buku ini. Yang ke dua karena rentang waktu pengajaran yang cukup lama (dua semester) sedangkan materinya terbatas hingga banyak waktu yang kosong (biasanya di gunakan untuk menghafalkan dalil) .



besar warga Ngruki berasal dari kelas bawah dan *double income* merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Akibatnya kaum perempuan berperan ganda dan mengalami *overburden* (beban berlebihan) karena sehari-hari harus bekerja ekstra keras di rumah maupun mencari nafkah. Kaum lelaki umumnya hanya mencari nafkah saja dan tidak dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena beberapa alasan. Diantaranya adalah karena harus berkonsentrasi pada tugas dawah (alasan praktis) atau pembagian kerja telah ditetapkan agama (alasan normatif)

Beban berlebihan yang ditanggung kaum perempuan Ngruki (terutama yang telah berumah tangga) menggerakkan mereka untuk melancarkan "gerakan pemberdayaan perempuan". Salah satunya adalah dengan kampanye akan "kebutuhan suami Superman". Suami yang bersedia berperan ganda. Mencari nafkah dan sekaligus mengerjakan pekerjaan rumah tangga (membantu istri).

Kaum perempuan Ngruki mengidolakan Figur Ust M, seorang warga komunitas ini sebagai contoh lelaki ideal. Apa keistimewaan Ust M? Di lingkungan pondok Pesantren ini ia dikenal sebagai sosok yang "di atas" rata-rata. Ia saleh, aktivis dakwah, *qona'ah* (sederhana), berkomitmen kuat kepada gerakan Islam dan yang istimewa ia dikenal sangat mencintai keluarga. Ia aktif mengerjakan pekerjaan rumah dan mengasuh anak, memanjakan istri meski sangat sibuk mengajar dan berdakwah. Ia menjalankan beragam peran, baik di ruang domestik maupun publik. *Walhasil*, ia sangat meringankan beban sehari-hari istrinya. Saking populernya figur Ust M, hingga jika ada perempuan warga al Mukmin yang hendak menikah ada semacam "doa", bahwa semoga sang suami akan seperti ust M.

Selain penyebaran hal yang bersifat praktis seperti di atas, strategi pemberdayaan lain yang dijalankan terkait dengan teks. Teks memiliki kedudukan sentral dalam kehidupan komunitas ini. Persoalan selalu diarahkan dan bertumpu pada teks (al Quran dan Hadist). Namun untuk upaya pemberdayaan, kaum perempuan tidak selalu sejalan dengan rujukan teks yang dibakukan di komunitas ini. Mereka seringkali "melanggar" teks dan norma kelompok. Pelanggaran yang paling sering terjadi adalah kasus bepergian tanpa *mahram* melebihi jarak *syar'i* (lebih dari sehari semalam). Sebagai contoh apa yang dialami Ustadzah A " *Yah gimana ya, soalnya saya harus menghadiri walimatul ursy (pesta pernikahan) keluarga. Sulit cari mahram selama di perjalanan, n ya saya pergi sendiri,* " Ujar Usdh A.

Peraturan kelompok yang sering dilanggar juga adalah KB (family planning). Menurut beberapa pemimpin komunitas KB memang dilarang karena tidak sesuai dengan ketentuan agama. Ketentuan ini merujuk kepada salah satu hadis Nabi Muhammad mengharapkan



umatnya berlimpah-ruah. Jadi upaya untuk menekan jumlah ummat adalah perbuatan yang dikalim tidak islami. Ustadh B yang diam-diam ikut KB memberikan alasan sebagai berikut “*Saya ikut KB secara sembunyi-sembunyi. Saya dan suami tidak merasa berdosa karena KB itu untuk mengatur kelahiran bukan untuk mengurangi apalagi menghentikan kelahiran seperti yang dilarang agama*”

Pada kesempatan lain, untuk mendukung kepentingan mereka, kaum perempuan memilih dan menggunakan interpretasi yang menguntungkan atau berdampak positif bagi kedudukan mereka. Dalam hal ini paling tidak ada 2 jenis interpretasi yang dikemukakan.

**Pertama**, Interpretasi yang menegaskan superioritas lelaki.

Misalnya yang berkaitan dengan kepemimpinan. Menurut beberapa anggota komunitas, kepemimpinan lelaki tidak bermasalah bahkan positif jika menguntungkan kaum perempuan.

Menurut Ust B yang dibenarkan oleh ustadhah C “Menurut ajaran agama Islam karena lelaki adalah pemimpin atau kepala keluarga maka ia bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan keluarga termasuk kerja rumah tangga. Perempuan idealnya ya bertugas melahirkan kemudian hidup santai. Lelaki dan negara harus menanggung kehidupannya”. Ust C menambahkan “Itu lho seperti yang dilakukan di Saudi Arabia. Perempuan enak sekali. dimanja sekali”.<sup>4</sup>

**Kedua**, Interpretasi yang menonjolkan hak perempuan.

Secara factual komunitas ini tidak mempromote poligami sebagai tradisi. Karena berasal dari *lower class* lelaki di Ngruki tidak sanggup berpoligami karena syarat yang berat. Hanya pimpinan komunitas yang melakukan poligami. Itupun menurut beberapa anggota komunitas perempuan tidak diterima secara ikhlas terutama oleh sebagian keluarga mereka (terutama istri dan anak perempuan) para pemimpin tersebut. Sikap tidak senang terhadap poligami dari sebagian keluarga pemimpin ini cukup banyak diketahui anggota komunitas. Dalam perkara Poligami ini, beberapa anggota komunitas perempuan menekankan keharusan factor kesanggupan ekonomi dan keadilan terhadap istri. Dan hal ini sungguh amat sulit untuk tidak mengatakan tak mungkin. Ada sebagian juga yang mengatakan bahwa memang ajaran agama

---

<sup>4</sup> Ini adalah impian sebagaimana perempuan Ngruki. Sebuah impian untuk merasakan “kenikmatan” Syariah ala Saudi Arabia yang menurut mereka serba “berlimpah” dimana perempuan dibebaskan dari berbagai beban domestik sehingga terlepas dari rutinitas yang menyengsarakan. Ini khas impian perempuan kelas bawah akan kehidupan yang lebih menyenangkan



mensahkan poligami tetapi sebagai manusia rasanya mereka sulit menerimanya. "Mungkin iman saya masih kurang ya, tukas salah seorang ustadhah. Tetapi ada beberapa orang yang tak berkeberatan jika suami mereka berpoligami. "Poligami, mengapa tidak? Itu toh sudah merupakan ketentuan Islam. Andai suami saya mau berpoligami saya tidak berkeberatan. Asal dengan alasan yang jelas bersesuaian dengan agama"

@@@@@

*Liku liku dan perjalanan perempuan Ngruki tampaknya membuat mereka kini sampai pada kesimpulan bahwa kekuasaan merupakan alat yang ampuh untuk merealisasikan kepentingan<sup>5</sup>. Dari berbagai perbincangan dapat disimpulkan bahwa rupanya mereka belajar bahwa Selama ini posisi pinggiran mereka di arena kekuasaan membuat mereka gagal merealisasikan kepentingan tersebut. Tuntutan kaum perempuan adalah perubahan struktural dimana kaum perempuan memegang posisi pengambil keputusan. I'tikad untuk masuk arena kekuasaan telah sangat kuat dan dimotori oleh perempuan-perempuan yang berwibawa di komunitas tersebut.<sup>6</sup>*

Memang dalam konteks realisasi syariah, wacana yang sering didengungkan pihak pesantren adalah mekanisme pengelolaan ksantrian putri yang dilakukan oleh kaum perempuan sendiri (tanpa banyak intervensi dari pihak laki laki). Hal ini "ditangkap dan didesakkan" oleh kelompok perempuan.

Namun Ketika wacana itu didesakkan untuk direalisasikan sepenuhnya, para pemimpin pesantren (yang semua lelaki) masih enggan memberi otonomi penuh kepada kaum perempuan untuk mengelola pesantren putri secara mandiri. Alasannya adalah hal ini amat sulit dilakukan secara menyeluruh karena terbentur pada masalah-masalah praktis khas perempuan (seperti cuti hamil, keterbatasan gerak, kerepotan rumah tangga) maupun

---

<sup>5</sup> 10 tahun lalu lalu situasi seperti ini tidak muncul (perempuan cenderung menolak kekuasaan). Memang selama beberapa periode belakangan pesantren putri selalu dipimpin oleh para *ustadh* (guru lelaki). Kepemimpinan diserahkan kepada para *ustadh* awalnya karena keengganan beberapa *ustadhah* (guru perempuan) senior yang dinominasikan untuk posisi ini. Alasan penolakan mulai dari kerepotan rumahtangga sampai tidak pantas memimpin semasa masih ada pria.

<sup>6</sup> Orang pertama dan ke dua terkaya di komunitas Ngruki adalah perempuan. Mereka pebisnis yang sukses. Salah satunya karena pada awalnya memanfaatkan jaringan orangtua santri sebagai lahan bisnisnya. Ini merupakan salah satu factor yang memperkuat posisi tawar perempuan di komunitas ini. Di samping mereka ada beberapa perempuan yang "kharismatis" seperti istri pimpinan komunitas, beberapa *ustadzah* (termasuk istri *ustadh* "superman" seperti yang diceritakan di atas)



karena prinsip-prinsip agama yang mengatur ruang gerak perempuan (Misalnya keharusan disertai mahram dalam bepergian dan menghindari *ikhhtilat*).

Tarik menarik kepentingan tak terelakkan lagi. Akhirnya di kepengurusan Pesantren putri yang baru diambil jalan tengah. Posisi ketua dan wakil kesartrian putri, pada periode kepengurusan terakhir tetap diserahkan kepada lelaki<sup>7</sup> sedangkan kaum perempuan menduduki posisi sebagai ibu asrama dan pembimbing spiritual. Keputusan ini diterima sebagai sebuah “kemenangan” oleh kelompok perempuan. Namun sayangnya keputusan tersebut tidak segera direalisasikan dengan alasan yang kurang jelas.

Sebenarnya jika kekuasaan telah berada di tangan kaum perempuan mereka telah mempunyai berbagai rencana perbaikan pembinaan santri di kesartrian putri baik bersifat fisik, intelektual dan spiritual. Selain itu kepentingan warganya yang lain seperti para ustadhah juga dikedepankan. Diantaranya masalah TPA<sup>8</sup> untuk anak para asathidzah (guru-guru perempuan) dan pembenahan koperasi<sup>9</sup>.

Beragam keprihatinan yang dirasakan oleh kaum perempuan al Mukmin mendorong mereka untuk bergerak ke atas (baca : Merebut tampuk kekuasaan). Karena mereka belajar

---

<sup>7</sup> Dengan alasan untuk *menghandle* urusan luar yang susah dilakukan kaum perempuan dan persoalan teknis yang tak bisa ditangani kaum perempuan. Misalnya listrik bermasalah, air, bangunan bocor dll

<sup>8</sup> “Sudah lama sebenarnya kami meminta perhatian untuk pembuatan TPA (*tempat pengasuhan anak*) yang layak bagi anak para asathidzah (guru perempuan) yang mengajar. Tetapi sayangnya pesantren kurang menanggapi. Akhirnya dengan solidaritas sesama guru perempuan kami urunan tiap bulan Rp 5000 untuk biaya operasional menjalankan TPA sederhana. Dulu pesantren pernah menyumbang Rp 75.000 perbulan tetapi ndak kemudian lama berhenti. Semoga ke depan pesantren lebih mau peduli. Khan ada anjuran untuk punya anak banyak. Pesantren seharusnya membantu dalam hal ini ya. Agar para asathidzah lebih ringan bebannya. Pada akhirnya yang untung para santri juga, karena ustadhanya fresh hingga bisa mengajar dengan lebih baik. Jika santri yang lulus lebih berkualitas maka buahnya yang memetik ummat juga. Ummat akan mendaapat bimbingan degan lebih baik pula , *komentar usthadzah C*

<sup>9</sup> Koperasi sebagai bagian dari Kepentingan perempuan juga hendak ditata kembali oleh kaum perempuan. Koperasi diperuntukkan untuk sebagai sarana peningkatan inkam yang penting bagi keluarga pesantren. Ustadhah maupun istri ustadh diberi kesempatan untuk menyettor jajanan (makanan dan minuman). Ini salah satu cara untuk menambah penghasilan keluarga yang strategis dan “terjangkau”. Sarana ini sangat “menggiurkan”. Namun terdangar sas sus bahwa karena lebih konsen ke berdagang di koperasi ada diantara ustadhah yang tidak terlampau konsen mengajar. “Masalahnya laba dari berdagang di koperasi lebih besar dari gaji sebagi ustadhah, apalagi yang honorer”. menurut pembicaraan beberapa ustadhah dan istri ustadh, koperasi sudah menyimpang dari syaria dan lagi dampaknya meretakkan ukhuwah diantara kaum perempuan. Untuk itulah masalah pembenahan koperasi diagendakan sebagai agenda mendesak.

“*koperasi sekarang ini kok nggak syar’i malah sepertinya pake sistem globalisasi bangeth. Akibatnya hanya menguntungkan segelintir orang. Kami, para penyettor dipacu untuk bersaing. Dagangan siapa yang laku itulah pemenangnya. Yah...ibu-ibu yang lain yang jualannya nggak laku ya gimana. Ini ndak bisa dibiarkan. Sistem ini merusak ukhuwah dintara ibu-ibu penyettor. Muncul iri, nggrundel, pokoknya hubungan jadi nggak sehat. Jadi, ini penting untuk dibenahi. Ini agenda mendesak*” komentar ustadhah D



dari pengalaman bahwa tanpa kekuasaan kepentingan sering terganjal. Mereka kini berupaya mematahkan halangan cultural, normatif, maupun struktural. Perempuan Ngruki kini memandang kekuasaan sebagai sebuah tangga untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik. Mereka mendesakkan kepentingan mereka, dengan berbagai cara, termasuk **memakai sekaligus melanggar Syariah...!**

## Refleksi

Silaturahmi saya ke Pesantren Al Mukmin Ngruki, sebuah lembaga yang dicap “fundamentalis” (dan tidak setuju *gender equality* secara konseptual) semakin menegaskan makna khusus kekuasaan dari pandangan perempuan.

Memakai momen penerapan Syariah Islam yang dinilai bahkan dirasakan sementara orang sebagai “anti kekuasaan bahkan sumber penindasan” perempuan, secara cerdas perempuan Ngruki bersiasat untuk menapak kuasa. Mereka mendesakkan agenda pengelolaan kesantunan putri agar dilakukan oleh kaum perempuan sendiri. Kapling yang selama ini menjadi domain dan didominasi kaum lelaki dengan berbagai alasan, sosial maupun keagamaan. Di awal abad 21 ini, perempuan Al Mukmin Ngruki telah berkata **tidak** pada sistem yang serba lelaki, mutlak lelaki...

Saya menarik masuk fenomena Ngruki sebagai bagian dari geliat perempuan Indonesia masa kini<sup>10</sup>. Kaum perempuan Indonesia, kini bukan hanya bicara namun lebih jauh mengembangkan politik *ala* perempuan secara terbuka dan penuh percaya diri. Dan fenomena itu bukan hanya merupakan kisah kaum perempuan kota, “moderen”, elite, terpelajar, berduit dan “progressif”. Tidak! Ia pun “dialami” perempuan-perempuan yang dianggap “terbelakang”, kolot, anti kesetaraan gender dengan tubuh di belit jubah dan cadar (seperti yang ada di Ngruki). Mereka tengah menegaskan pentingnya kekuasaan bagi kaumnya. **Kekuasaan untuk** (power for) bukan **kekuasaan atas** (power over), seperti yang banyak terjadi selama ini.

---

<sup>10</sup> Dalam 10 tahun terakhir, kaum perempuan diberbagai kelompok/organisasi seperti organisasi masa umum, partai politik, aktivis LSM, ormas agama (seperti perempuan NU, Muhammadiyah juga dari kalangan Katolik dan Protestan) menuntut posisi untuk menduduki jabatan strategis sebagai pengambil keputusan). Hasil penelitian di Pesantren putri Ngruki menambah daftar tersebut.





Kekuasaan yang telah begitu banyak memakan korban. Salah satunya adalah kaum perempuan sendiri .....

Lenteng Agung Jakarta,  
5 September 2004

Warning Sign of Fundamentalisms (Ayesha Imam, Jenny Morgan and Nira Davis,  
WUML, Desember 2004

Terkait dengan hal tersebut di atas, diantara beberapa persoalan yang amat ditekankan disini adalah disiplin ibadah dan berbahasa resmi, terutama Arab. Bahasa Inggris secara faktual kurang ditekankan. Sementara bahasa daerah dilarang keras, karena sering merupakan picu sektarianisme-kedaerahan. Persoalan lain yang sangat diperhatikan adalah kesempurnaan menutup aurat dan masalah etika pergaulan (terutama antar laki-laki dan perempuan). Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berkenaan dengan ibadah, kebahasaan, berpakaian, pergaulan, etika dan disiplin belajar serta kebersihan lingkungan akan mendapat sangsi sesuai dengan derajat pelanggaran.

*Untuk kasus santri misalnya, setiap hari hampir selalu ada pengadilan syariah terhadap santri yang melanggar syariah kelas ringan, seperti tidak mengenakan kaos kaki ketika keluar kamar (pelanggaran tidak sempurna menutup aurat) atau terlambat sholat jamaah (pelanggaran disiplin ibadah). Sesekali ada kasus berat yang hukumannya “dicambuk” (memakai sapu). Mencuri diatas Rp 50 Ribu. Hukuman semacam ini dilakukan di masjid, dihadapan jama'ah sholat. Hukuman terberat adalah mengeluarkan santri, karena kesalahan yang dilakukan tidak dapat ditolerir lagi, seperti kasus pencurian berulang-kali. Beberapa kali pesantren terpaksa mengeluarkan santri karena alasan ini.*

Objek hukum bukan hanya ditujukan kepada santri tetapi juga para *asathidhah* (guru perempuan). Berat ringannya sesuai dengan derajat kesalahan yang dilakukan. Sebagai contoh beberapa orang ustadhah muda pernah dikenakan hukuman skors mengajar selama 6 bulan karena ketahuan/kepergok pergi mendaki gunung. Hal itu dianggap melanggar rambu rambu



syaria tentang *safar nisa* (ketentuan bepergian bagi perempuan) yang telah ditetapkan. Meskipun salah seorang ustadhah memprotes hukuman tersebut karena kepergiannya disertai *mahram* (adik lelakinya) majlis hakim pesantren tetap saja menjatuhkan hukuman tersebut.

Hal lain yang selalu diwaspadai pesantren adalah pengaruh kebudayaan “luar”. Dalam kerangka itu pula lembaga sensor di dibentuk. Lembaga ini memberlakukan disiplin yang sangat ketat terhadap kemungkinan masuknya hal-hal yang dikategorikan negatif, termasuk informasi dari luar yang dianggap “menyimpang”.

@ @ @ @

